

**LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 2 TAHUN 2013  
TANGGAL 14 MEI 2013**

**INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**A. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NO	DPP	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			2013-2018	2019-2023	2024-2028	
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>PENGEMBANGAN DI WILAYAH BARAT</b>					
	A. Kawasan Wisata Pantai Lunci di Kabupaten Sukamara dan Kawasan Wisata Pantai Bogam Raya Dikabupaten Kotawaringin Barat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengembangan dan penataan ruang wisata</li> <li>2. pengembangan wisata tirta dengan kegiatan wisata alam laut</li> <li>3. pengembangan area kuliner dan perbelanjaan produk lokal tradisional khas Kalimantan Tengah</li> <li>4. pengembangan prasarana, fasilitas, aksesibilitas, dan pengembangan pemasaran</li> <li>5. pengembangan industri pariwisata yang sesuai</li> <li>6. pemeliharaan lingkungan dan kawasan sekitar pantai</li> </ol>				SKPD yang bertanggung jawab di bidang tata ruang, tata bangunan dan jalan, pariwisata, industri dan perdagangan .

NO	DPP	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			2013-2018	2019-2023	2024-2028	
1	2	3	4	5	6	7
	B. Kawasan Betang Tumbang Gagu Kabupaten Kotawaringin Timur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengembangan lokasi wisata cagar budaya, dan sejarah</li> <li>2. pengembangan wisata budaya dengan kegiatan tarian tradisional, kerajinan, memasak dan kuliner,</li> <li>3. pengembangan prasarana, fasilitas, aksesibilitas, dan pengembangan pemasaran</li> <li>4. pengembangan industri pariwisata yang sesuai</li> <li>5. pengembangan atraksi wisata petualangan</li> <li>6. konservasi dan pemeliharaan lingkungan betang dan kawasannya</li> </ol>				SKPD yang bertanggung jawab di bidang pembangunan dan pengembangan sungai dan jalan, lingkungan, pariwisata, industri dan perdagangan
<b>II</b>	<b>PENGEMBANGAN DI WILAYAH TENGAH</b>					
	A. Kawasan Huma Hai Buntoi Kabupaten Pulang Pisau dan Agrowisata Basarang Kabupaten Kapuas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengembangan dan penataan kawasan wisata alam berbasis perkebunan</li> <li>2. pengembangan lokasi wisata cagar budaya, dan sejarah</li> </ol>				SKPD yang bertanggung jawab di bidang pembangunan dan pengembangan sungai dan jalan, lingkungan, pariwisata, industri dan perdagangan

NO	DPP	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			2013-2018	2019-2023	2024-2028	
1	2	3	4	5	6	7
		3. pengembangan prasarana, fasilitas, aksesibilitas, dan pengembangan pemasaran. 4. pengembangan wisata budaya dengan kegiatan tarian tradisional, kerajinan, memasak dan kuliner, 5. pengembangan industri pariwisata yang sesuai 6. pengembangan lahan kepada perkebunan sebagai daya tarik wisata 7. konservasi dan pemeliharaan lingkungan huma hai dan kawasannya 8. pemeliharaan lingkungan sekitar perkebunan				
	B. Kawasan Danau Tahai - Bukit Tangkiling dan Tugu Soekarno di Kota Palangka Raya	1. pengembangan panorama kawasan wisata alam pemandangan dan hiburan. 2. pengembangan lokasi wisata cagar budaya, dan sejarah bernunsa pendidikan. 3. pengembangan prasarana, fasilitas, aksesibilitas, dan pengembangan pemasaran. 4. pengembangan wisata budaya dengan kegiatan tarian tradisional, kerajinan, memasak dan kuliner,				SKPD yang bertanggung jawab di bidang pembangunan dan pengembangan sungai dan jalan , lingkungan, pariwisata, industri dan perdagangan

NO	DPP	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			2013-2018	2019-2023	2024-2028	
1	2	3	4	5	6	7
		5. pengembangan industri pariwisata yang sesuai 6. pemeliharaan lingkungan sekitar tempat wisata.				
	C. Bukit Batu, Danau Bulat, Riam Mangkikit, dan Betang Rangan Bahekang di Kabupaten Katingan	1. pengembangan lokasi wisata cagar budaya, tirta, dan sejarah. 2. pengembangan prasarana, fasilitas, aksesibilitas, dan pengembangan pemasaran. 3. pengembangan wisata budaya dengan kegiatan tarian tradisional, kerajinan, memasak dan kuliner, 4. pengembangan wisata flora dan fauna sebagai wisata alam 5. pengembangan industri pariwisata yang sesuai 6. pemeliharaan lingkungan sekitar tempat wisata 7. pemeliharaan lingkungan dan kawasan danau.			SKPD yang bertanggung jawab di bidang pembangunan dan pengembangan sungai dan jalan , lingkungan, pariwisata, industri dan perdagangan	

NO	DPP	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			2013-2018	2019-2023	2024-2028	
1	2	3	4	5	6	7
<b>III</b>	<b>PENGEMBANGAN DI WILAYAH TIMUR</b>					
	A. Daya Tarik Wisata di Kawasan Gunung Lumut - Gunung Pararawen di Kabupaten Barito Utara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengembangan dan penataan ruang wisata</li> <li>2. pengembangan wisata flora dan fauna sebagai wisata alam</li> <li>3. pengembangan prasarana, fasilitas, aksesibilitas, dan pengembangan pemasaran</li> <li>4. pengembangan industri pariwisata yang sesuai</li> <li>5. pemeliharaan lingkungan sekitar gunung</li> </ol>				SKPD yang bertanggung jawab di bidang tata ruang, tata bangunan dan jalan, pariwisata, industri dan perdagangan
	B. Kawasan Taman Hutan Anggrek Hitam di Kabupaten Barito Timur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengembangan dan penataan kawasan tanaman anggrek sebagai wisata alam</li> <li>2. pengembangan kawasan perbelanjaan produk lokal tradisional</li> <li>3. pengembangan prasarana, fasilitas, aksesibilitas, dan pengembangan</li> </ol>				SKPD yang bertanggung jawab di bidang pembangunan dan pengembangan sungai dan jalan , lingkungan, pariwisata, industri dan perdagangan

NO	DPP	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			2013-2018	2019-2023	2024-2028	
1	2	3	4	5	6	7
		pemasaran				
		4. pengembangan industri pariwisata yang sesuai				
		5. pemeliharaan lingkungan dan kawasan desa terdekat				

**B. RINCIAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2013 – 2018**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pariwisata	Peningkatan Profesionalisme para pemandu wisata melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan terkait	Tersertifikasinya pemandu wisata setiap tahun	a. Dinas kebudayaan dan Pariwisata b. Himpunan Pramuwisata Indonesia c. Badan Nasional Sertifikasi Provinsi
		Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan pengelola <i>homestay</i> di Desa –desa Wisata di destinasi wisata	Terselenggaranya pelatihan pengelolaan <i>homestay</i> di destinasi wisata	Dinas kebudayaan dan Pariwisata
		Penyuluhan Sadar wisata untuk masyarakat penyedia jasa transfortasi lokal (ojek, taxi, klotok, kapal, speedboad dan lainnya)	Terselenggaranya penyuluhan sadar wisata di destinasi	a. Dinas kebudayaan dan Pariwisata b. Dinas Perhubungan Komunikasi dan informasi c. Kepolisian
		pembinaan sadar wisata untuk masyarakat penyedia jasa boga, kerajinan, dan kesenian tradisional.	Terselenggaranya penyuluhan sadar wisata di destinasi	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata b. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) c. Sanggar Seni daerah

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
1	2	3	4	5
		Sertifikasi usaha jasa Pariwisata	Tersertifikasinya usaha jasa pariwisata	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata b. Lembaga Sertifikasi Kepariwisataan
		Pengembangan dan Pembinaan Kompetensi Kewirausahaan Masyarakat di sektor-sektor usaha Pariwisata.	Terlaksananya kegiatan pelatihan kewirausahaan di bidang Pariwisata.	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata b. Perguruan Tinggi
		<i>Training for Trainers (TOT)</i> pelaku usaha Pariwisata	Terlaksananya <i>Training for Trainers (TOT)</i> pelaku usaha kepariwisataan di destinasi pariwisata	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata b. Pelaku Usaha
		Uji kompetensi pelaku usaha pariwisata	Terlaksananya uji kompetensi pelaku usaha pariwisata	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata b. Perguruan Tinggi
2.	Meningkatkan Dampak Pariwisata kepada Masyarakat	Penyelenggaraan kursus bahasa Asing dan pertemuan ( <i>meeting</i> ) rutin untuk pemandu wisata dan pengelola <i>homestay</i> di seluruh destinasi pariwisata	Terselenggaranya kegiatan pelatihan bahasa Asing dan pertemuan rutin untuk memandu wisata dan pengelola <i>homestay</i>	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata b. Lembaga Bahasa c. Perguruan Tinggi
		Pembinaan dan pelatihan pengelola show room, rumah produk dan pengelola usaha kecil terkait lainnya.	Terlaksananya pelatihan pengelola show room, rumah produk, dan lain-lain	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
		Pendampingan dan pembinaan pengrajin untuk mendukung pengembangan wisata kerajinan ( <i>craft tourism</i> ).	Terlaksananya pembinaan pengrajin untuk mendukung pengembangan wisata kerajinan ( <i>craft tourism</i> ).	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata b. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
		Pengembangan dan pembinaan kelompok kesenian rakyat tradisional (seni pertunjukan di desa-desa wisata di seluruh destinasi pariwisata)	Terselenggaranya pelatihan peningkatan keterampilan kelompok seni pertunjukan.	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata b. Pelaku bisnis pariwisata. c. Sanggar Seni daerah
		Benchmarking sumber daya manusia pariwisata di lingkungan pemerintah (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) dalam rangka peningkatan standar kompetensi SDM pariwisata.	Terlaksananya ke lembaga yang relevan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
1	2	3	4	5
3.	Membangun sarana, prasarana dan aksebilitas pariwisata	Peningkatan kualitas fisik <i>Tourist Information Center</i> (TIC) di destinasi pariwisata	Terdapat <i>Tourist Information Center</i> (TIC) yang memadai	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
		Pembangunan tempat bersantai di objek-objek wisata di semua destinasi	Terbangunnya tempat bersantai di 1 ( <i>satu</i> ) destinasi pariwisata per tahun	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata b. Industri kepariwisataan
		Peningkatan kualitas sarana dan prasarana akomodasi dengan nuansa alam.	Tersedianya sarana akomodasi yang memadai	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata b. Swasta (Investor).
		Penanaman pohon kawasan wisata di semua destinasi pariwisata untuk mendukung pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan.	Tertanamnya pohon di destinasi pariwisata	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata b. Dinas Kehutanan c. Swasta (Investor).
		Pengembangan <i>Public place</i> yang sekaligus berfungsi sebagai tempat atraksi seni dari grup-grup kesenian daerah.	Terbangunnya public place di destinasi pariwisata	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata b. Dinas PU (Cipta Karya dan Tata Ruang)
		Pembangunan wahana air di objek-objek wisata yang berupa danau di destinasi pariwisata	Terbangunnya wahana air di destinasi pariwisata yang berupa danau	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata b. Dinas PU (Pengelolaan Sumber Daya Air)
		Pembangunan papan interpretasi ( <i>interpretation board</i> ) di objek-objek wisata di seluruh destinasi pariwisata	Terbangunnya papan interpretasi di destinasi pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Pembangunan <i>Tourist Information Centre</i> (TIC) di objek-objek wisata di destinasi pariwisata	Terbangunnya Pembangunan <i>Tourist Information Centre</i> (TIC) di destinasi pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Peningkatan kualitas teknologi ( cetak dan elektronik ) promosi pariwisata di <i>Tourist Information Centre</i> (TIC)	Tersusunnya leaflet dan website pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

### C. RINCIAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
1	2	3	4	5
1	Mengoptimalkan program pemasaran yang bersifat business to business	Pembuatan program Pemasaran <i>business to business</i>	Terlaksananya program pemasaran <i>business to business</i>	a. Dinas kebudayaan dan Pariwisata; b. Industri kepariwisataan
2	Mengoptimalkan kemitraan pemerintah dengan swasta dalam pemasaran dan promosi	Pengoptimalan kemitraan antara pemerintah dengan swasta untuk promosi	Adanya kemitraan antara pemerintah dengan swasta untuk promosi	a. Dinas kebudayaan dan Pariwisata; b. Industri kepariwisataan
3.	Mengoptimalkan efektifitas jalur-jalur distribusi pemasaran di sepanjang koridor wisata strategis wisatawan nusantara	Mengoptimalkan efektifitas jalur-jalur distribusi pemasaran di sepanjang koridor wisata strategis wisatawan nusantara	Optimalnya jalur-jalur distribusi pemasaran di sepanjang koridor wisata strategis wisatawan nusantara	a. Dinas kebudayaan dan Pariwisata; b. Asosiasi Pengusaha Pariwisata (ASITA)
4	Mengoptimalkan sinergi program promosi antar mata rantai stakeholder pada lingkup destinasi-destinasi pariwisata	Pembentukan dan optimalisasi forum promosi pariwisata	Terjadinya sinergi program promosi antar mata rantai stakeholder pada lingkup destinasi-destinasi pariwisata	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata b. Badan Promosi Pariwisata Daerah; c. Industri Kepariwisataan
5	Mengoptimalkan pengembangan serta diversifikasi produk wisata minat khusus sesuai keunggulan sumber daya yang dimiliki	Identifikasi produk wisata minat khusus  Pengembangan atraksi serta kegiatan wisata minat khusus	Teridentifikasi obyek-obyek wisata yang bisa dikembangkan ke arah minat khusus  Berkembangnya atraksi serta kegiatan wisata minat khusus	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; b. Asosiasi Travel dan Agen Indonesia (ASITA)  a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; b. Asosiasi Travel dan Agen Indonesia (ASITA)
6	Memanfaatkan produk baru dan produk yang diperbarukan dalam kegiatan promosi sesuai target pasar	Pemanfaatan produk baru dan produk yang diperbarukan dalam kegiatan promosi sesuai target pasar	Termanfaatkannya produk baru dan produk yang diperbarukan dalam kegiatan promosi sesuai target pasar	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; b. Asosiasi Travel dan Agen Indonesia (ASITA)

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
1	2	3	4	5
7	Reformasi dalam keikutsertaan semua jenis event yang didasarkan pada target pasar yang berfokus, dan intelelgent marketing	Berpartisipasi dalam setiap event-event pariwisata maupun pentas seni dan kebudayaan nasional dan internasional	Partisipasi dalam setiap event-event pariwisata maupun pentas seni dan kebudayaan nasional dan internasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;</li> <li>b. Pelaku wisata</li> </ul>
8	Mengoptimalkan penyelenggaraan event-event pariwisata berskala nasional dan internasional	Penyelenggaraan event pariwisata yang berskala nasional maupun Internasional seperti : gras strack, parade seni, upacara adat dan festival seni pertunjukan tradisional	Terselenggaranya <i>event</i> pariwisata yang berskala nasional maupun Internasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;</li> <li>b. Pelaku wisata</li> </ul>
9	Pemetaan program promosi yang dilakukan pesaing	Penelitian Pemetaan program promosi yang dilakukan pesaing	Adanya penelitian Pemetaan program promosi yang dilakukan pesaing	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;</li> <li>b. Badan Promosi Pariwisata Daerah ;</li> <li>c. Perguruan Tinggi</li> </ul>
10	Pengembangan program promosi yang kreatif	Pembuatan sistem promosi pariwisata berbasis teknologi komunikasi	Terbentuknya sistem promosi pariwisata berbasis teknologi	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Pembuatan booklet wisata pedesaan	Tersusunnya booklet tentang wisata pedesaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;</li> <li>b. Pelaku wisata</li> </ul>
		Pembuatan booklet wisata belanja	Tersusunnya booklet tentang wisata belanja	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;</li> <li>b. Pelaku wisata</li> </ul>
11	Penetapan Brand image destinasi untuk meningkatkan posisi tawar yang lebih tinggi	Perlu dibuatnya Brand image destinasi	Adanya Brand image destinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;</li> <li>b. Badan Promosi Wisata Daerah</li> </ul>
12	Pengembangan Program yang bermuara pada <i>Brand image</i> yang telah ditetapkan	Perlu dibuatnya program pemasaran yang komprehensif yang bermuara pada peningkatan <i>Brand image positif</i> dari <i>destinasi</i>	Adanya program-program pemasaran yang komprehensif yang bermuara pada peningkatan <i>Brand image positif</i> dari <i>destinasi</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;</li> <li>b. Badan Promosi Wisata Daerah</li> </ul>

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
1	2	3	4	5
13	Mengoptimalkan promosi pariwisata terpokus pada destinasi-destinasi pariwisata strategis	Mengoptimalkan program-program promosi pariwisata kearah destinasi pariwisata strategis	Adanya program-program promosi pariwisata kearah destinasi pariwisata strategis	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; b. Badan Promosi Wisata Daerah
14	Memperluas cakupan promosi	Memperluas cakupan promosi ke nasional dan internasional	Cakupan promosi yang mencapai nasional dan internasional dengan menggunakan sarana internet	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
15	Mengoptimalkan pemasaran produk wisata minat khusus sebagai kekuatan	Penguatan promosi wisata minat khusus dengan membuat website-website	Adanya wibsite khusus untuk wisata minat khusus	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Menggunakan sarana facebook, twitter dll untuk memasarkan wisata minat khusus sebagai wisata grup atau kelompok	Adanya pemasaran minat khusus melalui facebook, twitter, BB dsb.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
16	Mengoptimalkan program <i>pablik relation</i> (PR) yang kreatif	Pembuatan program program <i>pablik relation</i> (PR) yang kreatif dan sesuai dengan peningkatan brand image	Adanya program <i>pablik relation</i> (PR) yang kreatif dan sesuai dengan peningkatan brand image	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; b. Badan Promosi Wisata Daerah
17	Menempatkan masyarakat dan sumberdaya alam dan budaya sebagai konsep sentral program pemasaran pariwisata	Pembuatan program yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaanya	Adanya program promosi pemasaran yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaanya	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; b. pelaku industri pariwisata
18	Mempertimbangkan hak-hak masyarakat dan wisatawan untuk mendapatkan manfaat atas penyelenggaraan kegiatan pariwisata, serta pengelaman wisata yang berkualitas	Membuat aturan-aturan untuk melindungi hak-hak masyarakat dan wisatawan untuk mendapatkan manfaat atas penyelenggaraan kegiatan pariwisata, serta pengelaman wisata yang berkualitas	Adanya aturan-aturan untuk melindungi hak-hak masyarakat dan wisatawan untuk mendapatkan manfaat atas penyelenggaraan kegiatan pariwisata, serta pengelaman wisata yang berkualitas	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; b. Biro Hukum
19	Mengoptimalkan program dukungan pemberdayaan masyarakat kepedulian lingkungan dalam promosi produk pariwisata	Kelibatan lembaga swadaya masyarakat lingkungan dalam perencanaan promosi produk pariwisata	Terlibatnya lembaga swadaya masyarakat lingkungan dalam perencanaan promosi produk pariwisata	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; b. Lembaga Swadaya masyarakat.

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
1	2	3	4	5
20	Pengembangan pola-pola isentif terhadap semua upaya promosi dari para stakeholders yang mendasarkan pada konsep responsible tourism	Pembuatan aturan-aturan dalam penentuan pola isentif terhadap semua usaha promosi dari para stakeholders yang mendasarkan pada konsep responsible tourism	Adanya aturan yang jelas dalam penentuan pola isentif isentif terhadap semua upaya promosi dari para stakeholders yang mendasarkan pada konsep responsible tourism	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
21	Memrioritaskan pengembangan produk mendasarkan pada pertimbangan daya tarik/minat pasar ( <i>market atractive ness</i> ) dan kekuatan kompotisi ( <i>compotitive strengths</i> ) untuk menarik pasar (sesuai target pasar yang dituju)	Pembuatan promosi yang memprioritaskan pengembangan produk mendasarkan pada pertimbangan daya tarik/minat pasar ( <i>market atractive ness</i> ) dan kekuatan kompotisi ( <i>compotitive strengths</i> ) untuk menarik pasar (sesuai target pasar yang dituju)	Adanya program promosi yang memperioritaskan pengembangan produk mendasarkan pada pertimbangan daya tarik/minat pasar ( <i>market atractive ness</i> ) dan kekuatan kompotisi ( <i>compotitive strengths</i> ) untuk menarik pasar (sesuai target pasar yang dituju)	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; b. Asosiasi travel dan agen indonisi (ASITA) c. Persatuan hotel dan restoran indonesia (PHRI) d. Badan Promosi Pariwisata Daerah
22	Mengembangkan paket-paket dan pola kunjungan yang kreatif dan terfokus pada target pasar dan minat terhadap produk	Pelibatan hotel dan tour agency untuk pengembangan paket dan pola kunjungan yang kreatif dan terfokus pada target pasar dan minat terhadap produk	terlibatnya hotel dan tour agency untuk pengembangan paket dan pola kunjungan yang kreatif dan terfokus pada target pasar dan minat terhadap produk	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; b. Asosiasi travel dan agen indonisi (ASITA) c. Persatuan hotel dan restoran indonesia (PHRI)
23	Mengoptimalkan pemberahan dan pengembangan produk yang mendukung strategi pencitraan / branding	Pemberahan dan pengembangan produk yang mendukung strategi pencitraan / branding	Adanya strategi pengembangan produk yang mendukung strategi pencitraan / branding	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
24	Mengembangkan basis data dan informasi produk wisata didestinasi Pariwisata yang updated, terintegrasi, dan antisipatif terhadap akses pasar yang semakin kritis/smart untuk pengaturan perjalanan	updated, basis data dan informasi produk wisata didestinasi Pariwisata yang updated, terintegrasi, dan antisipatif terhadap akses pasar yang semakin kritis/smart untuk pengaturan perjalanan	Terabdatnya basis data dan informasi produk wisata didestinasi Pariwisata yang updated, terintegrasi, dan antisipatif terhadap akses pasar yang semakin kritis/smart untuk pengaturan perjalanan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
1	2	3	4	5
25	Mengoptimalkan fungsi dan kualitas website, promosi pariwisata sebagai sarana promosi berbasis teknologi informasi yang inovatif dan interaktif	Pelatihan staff untuk membuat program pemasaran lewat website / internet	Staf mampu melakukan pemasaran lewat website / internet	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
		Perlunya staf khusus yang bertanggung jawab terhadap update dan reply atas permintaan informasi dari wisatawan lewat website	Adanya staf khusus yang bertanggung jawab terhadap website	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
26	Memperluas jejaring website promosi pariwisata dengan website terkait yang mempromosikan destinasi pariwisata	Membuat kerjasama dengan website-website lain untuk saling bertukar link	Terciptanya jejaring dunia maya yang semakin lama semakin luas	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
27	Meningkatkan sinergi promosi	Peningkatan sinergi promosi dengan sektor-sektor lain	Terjadinya sinergi promosi dengan sektor-sektor lain	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
28	Meningkatkan efisiensi fungsi dan manfaat jalur distribusi pemasaran dan promosi dengan strategi promosi yang terfokus	Perencanaan strategis promosi yang mempertimbangkan jalur-jalur distribusi pemasaran	Terencananya strategi promosi yang mempertimbangkan jalur-jalur distribusi pemasaran	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; b. Asosiasi travel dan agen indonisi (ASITA) c. Persatuan hotel dan restoran indonesia (PHRI)
29	Mengoptimalkan fungsi dan keberadaan komunitas-komunitas pasar potensial untuk melakukan penetrasi pasar	Pengidentifikasi dan pemanfaatan komunitas-komunitas masyarakat untuk memasarkan produk pariwisata	Teridentifikasinya dan pemanfaatan komunitas-komunitas masyarakat untuk memasarkan produk pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

**D. RINCIAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2013 – 2018**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
1	2	3	4	5
1	Peningkatan kapasitas penguasaan teknologi informasi dalam pengembangan usaha pariwisata.	Pelatihan penguasaan teknologi informasi bagi para pelaku usaha pariwisata di lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah.	Terlatihnya pelaku usaha dalam hal pengusahaan teknologi informasi	a. Dinas kebudayan dan Pariwisata b. Pelaku usaha pariwisata
2	Pengembangan <i>online business transaction</i>	Pembuatan <i>website online transaction</i>	Terciptanya <i>website online transaction</i>	a. Dinas kebudayan dan Pariwisata b. Pelaku usaha pariwisata
3	Peningkatan dan pengembangan sertifikasi nasional bagi usaha pariwisata	Pelatihan sertifikasi nasional bagi usaha pariwisata lingkungan provinsi Kalimantan Tengah.	Terbukanya wacana pelaku usaha pariwisata mengenai pentingnya sertifikasi	a. Badan Nasional sertifikasi profesi. b. Dinas kebudayan dan Pariwisata c. Pelaku usaha pariwisata
4	Sertifikasi usaha pariwisata	Pelaksanaan ujian sertifikasi usaha pariwisata	Terwujudnya usaha pariwisata yang memiliki sertifikasi nasional	a. Badan Nasional sertifikasi profesi. b. Dinas kebudayan dan Pariwisata c. Pelaku usaha pariwisata
5	Peningkatan kemampuan manajerial dalam pengelolaan usaha pariwisata berdaya saing	Pelatihan pengelolaan usaha pariwisata yang berdaya saing	Terwujudnya usaha pariwisata yang berdaya saing.	a. Perguruan tinggi b. Dinas kebudayaan dan pariwisata c. Pelaku usaha pariwisata
6	Penerapan <i>tax holiday insentif</i> untuk usaha baru pariwisata	Penyusunan kebijakan <i>tax holiday insentif</i> untuk usaha baru pariwisata	Tersusunnya kebijakan <i>tax holiday insentif</i> untuk usaha baru pariwisata	a. Pemerintah daerah b. Dewan perwakilan rakyat daerah Propinsi Kalimantan Tengah
7	Pemberian insentif perizinan	Pemberian insentif dan kemudahan perizinan bagi usaha pariwisata.	Terwujudnya insentif perizinan kepada usaha pariwisata.	a. Badan penanaman modal daerah b. Pelayanan terpadu satu pintu

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
1	2	3	4	5
8	Penerapan standar penerapan keamanan untuk setiap usaha pariwisata	Penyusun standar keamanan untuk setiap usaha pariwisata	Tersusunya panduan standar keamanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perguruan tinggi</li> <li>b. Dinas kebudayaan dan pariwisata</li> <li>c. Pelaku usaha pariwisata</li> </ul>
9	Pemberian sanksi bagi usaha pariwisata yang tidak mematuhi standard keamanan yang telah di tetapkan	Operasi penerapan standar keamanan usaha pariwisata dan pemberian sanksi bagi usaha pariwisata yang tidak mematuhi standard keamanan	Terwujudnya penerapan standard keamanan usaha pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Satuan polisi pamong praja;</li> <li>b. Dinas kebudayaan, dan pariwisata;</li> <li>c. Pelaku usaha pariwisata</li> </ul>
10	Pengembangan sistem asuransi yang <i>reliable</i> untuk wisatawan	Penetapan asuransi bagi wisatawan di lingkungan daya tarik wisata	Ditetapkanya pemberian asuransi bagi wisatawan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas kebudayaan dan Pariwisata;</li> <li>b. Pengelola daya tarik wisata</li> </ul>
11	Pengembangan skema kerjasama antarusaha pariwisata dalam menciptakan paker dan menjual produk wisata	Fasilitas penyusunan pola kerjasama antar usaha pariwisata dalam menciptakan paket dan menjual produk wisata	Tersusunya pola kerjasama antar usaha pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas kebudayaan dan pariwisata</li> <li>b. Asosiasi travel dan agen indonesia (ASITA)</li> <li>c. Pelaku usaha pariwisata</li> </ul>
12	Pemberian insentif bagi usaha pariwisata yang secara aktif memasarkan dan menjual produk wisata	Tourism award /penganugerahan penghargaan bagi usaha pariwisata yang secara aktif memasarkan dan menjual produk wisata	Terapresiasinya usaha pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas kebudayaan dan pariwisata;</li> <li>b. Pelaku usaha pariwisata</li> </ul>
13	Penggunaan sumber daya lokal (sumber daya manusia dan sumber daya lainnya) dalam menyelenggarakan usaha pariwisata	Penyusun kebijakan dan regulasi penggunaan sumber daya lokal dalam menyelenggarakan usaha pariwisata	Terciptanya kebijakan dan regulasi penggunaan sumber daya lokal dalam menyelenggarakan usaha pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas kebudayaan dan pariwisata</li> <li>b. Pelaku usaha pariwisata</li> </ul>
14	Pengembangan skema kerjasama antar pemerintah dan industri pariwisata dalam upaya perintisan pengembangan	Penyusunan skema kerjasama antar pemerintah dan industri pariwisata dalam upaya perintisan pengembangan	Tersusunya skema kerjasama antar pemerintah industri pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemerintah daerah</li> <li>b. Pelaku usaha</li> </ul>
15	Pemberian insentif kepada industri pariwisata yang menggunakan produk lokal dan produk usaha mikro,kecil dan menengah	Tourism award/penganugerahan penghargaan bagi usaha pariwisata yang menggunakan produk lokal dan produk usaha mikro,kecil dan menengah	Terapresiasinya usaha pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas kebudayaan dan Pariwisata</li> <li>b. Pelaku usaha pariwisata</li> </ul>

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
1	2	3	4	5
16	Fasilitas komunikasi antara pemerintah, usaha pariwisata, dan masyarakat dengan penyelenggaraan forum koordinasi dan komunikasi reguler	Pembentukan forum komunikasi pembangunan kepariwisataan provinsi Kalimantan Tengah	Terbentuknya forum komunikasi Terasifitasinya pertemuan rutin forum komunikasi	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata b. Pelaku Usaha Pariwisata c. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata d. Pelaku Usaha Pariwisata
		Fasilitas pertemuan rutin forum komunikasi pembangunan kepariwisataan Provinsi Kalimantan Tengah	Terasifitasinya pertemuan rutin forum komunikasi	
17	Pengembangan skema kerjasama antara pemerintah dan industri pariwisata dalam keadaan darurat dan/atau dalam penangananya yang terkait dengan kegiatan perjalanan dan kepariwisataan	Penyusun skema kerjasama antara pemerintah dan industri pariwisata dalam keadaan darurat (misal bencana alam)	Tersusunya skema kerjasama	a. Dinas kebudayaan dan pariwisata c. Pelaku Usaha Pariwisata
18	Pengembangan pola-pola rintisan dalam keadaan darurat	Penyusun pola-pola rintisan dan keadaan darurat	Tersusunya pola-pola rintisan dalam keadaan darurat	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata b. Stakeholder Kepariwisataan
19	Pengembangan pola-pola pendampingan dalam pemulihan kepariwisataan pasca kritis	Menyusun pola-pola pendampingan dalam pemulihan kepariwisataan pasca kritis	Tersusunya pola-pola pendampingan	a. Dinas Kebudayaan dan pariwisata b. Stakeholder Kepariwisataan
20	Pengembangan dukungan promosi bagi paket-paket produk wisata yang dibuat oleh kalangan usaha pariwisata	Fasilitas promosi bagi paket-paket produk wisata yang dibuat oleh kalangan usaha pariwisata	Terasifitasinya promosi bagi paket-paket produk wisata yang dibuat oleh kalangan usaha pariwisata	a. Dinas kebudayaan dan pariwisata b. pelaku usaha pariwisata
21	Pengembangan media informasi kepariwisataan ( <i>goteway information center</i> ) secara gratis ( <i>free of charge</i> ) di pintu-pintu masuk	Pembuatan media informasi kepariwisataan di pintu kedatangan wisatawan	Terciptanya media informasi kepariwisataan di pintu kedatangan wisatawan	Dinas kebudayaan dan pariwisata
22	Kampanye pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) bagi usaha pariwisata	<i>Sosialisasi Corporate Social Responsibility</i> (CSR) bagi usaha pariwisata	Tersosialisasinya <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) bagi usaha pariwisata	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata b. Pelaku Usaha Pariwisata

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
1	2	3	4	5
23	Persama antar pelaku pengembangan kegiatan rintisan ( <i>pilot project</i> ) <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) bersama antar pelaku usaha pariwisata dan replikasinya	Pembuatan pilot <i>project Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	Terciptanya <i>pilot project Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</li> <li>b. Pelaku usaha Pariwisata</li> </ul>
24	Peningkatan sistem koordinasi dan program yang integratif dalam menyalurkan dana <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dari usaha-usaha pariwisata	Penyusunan sistem koordinasi program yang integratif dalam menyalurkan dana <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	Tersusunnya sistem koordinasi dalam menyalurkan dana program yang integratif dalam menyalurkan dana <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</li> <li>b. Pelaku Usaha Pariwisata</li> </ul>
25	Pembuatan standard dan pedoman pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan usaha pariwisata	Penyusunan standard dan pedoman pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan usaha pariwisata	Tersusunnya standard dan pedoman pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan usaha pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Badan Lingkungan Hidup;</li> <li>b. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;</li> <li>c. Pelaku Usaha Pariwisata</li> </ul>
26	Pemberian sanksi yang tegas bagi usaha pariwisata yang melanggar peraturan pengelolaan lingkungan hidup	Operasi penerapan standard dan pedoman pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan usaha pariwisata dan pemberian sanksinya	Terwujudnya penerapan standar pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan usaha pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Satuan Polisi Pamong Praja</li> <li>b. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata</li> <li>c. Pelaku Usaha Pariwisata</li> </ul>
27	Pembuatan pedoman mengenai kewajiban usaha pariwisata dalam melestarikan sumberdaya budaya	Penyusunan pedoman mengenai kewajiban usaha pariwisata dalam melestarikan sumberdaya budaya	Tersusunnya pedoman mengenai kewajiban usaha pariwisata dalam melestarikan sumberdaya budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata</li> <li>b. Pelaku Usaha Pariwisata</li> </ul>
28	Melakukan pemasaran bersama antara pelaku wisata	Pemasaran kepariwisataan bersama antara pelaku wisata	Terbangunnya kebersamaan dalam memasarkan kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata</li> <li>b. Pelaku Usaha Pariwisata</li> </ul>

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
1	2	3	4	5
29	Melakukan pemasaran bersama antara pelaku wisata	Penyusunan skema kerjasama antara usaha pariwisata dalam menciptakan paket dan menjual produk wisata	Tersusunnya skema kerjasama antara usaha pariwisata dalam menciptakan paket dan menjual produk wisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata</li> <li>b. Pelaku Usaha Pariwisata</li> </ul>
30	Menyusun database seluruh asosiasi pariwisata	Penyusunan database seluruh asosiasi pariwisata provinsi Kalimantan Tengah	Tersusunnya database seluruh asosiasi pariwisata provinsi Kalimantan Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata</li> <li>b. Pelaku Usaha Pariwisata</li> </ul>
31	Membentuk gabungan industri pariwisata sebagai badan dan koordinator kerjasama yang sinegris antara usaha pariwisata	Pembentukan gabungan industri pariwisata	Terbentuknya gabungan industri pariwisata Kalimantan Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas Keudayaan Dan Pariwisata</li> <li>b. Pelaku Usaha Kepariwisataan</li> </ul>
32	Memastikan kuantitas dan kualitas layanan pendukung untuk usaha pariwisata, misalnya pasokan listrik	Penyusunan skema kerjasama instansi teknis terkait pengembangan pariwisata dengan pelaku usaha pariwisata	Tersusunnya skema kerjasama instansi teknis terkait pengembangan pariwisata dengan pelaku usaha pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;</li> <li>b. Pelaku Usaha;</li> <li>c. Perusahaan Daerah air minum</li> <li>d. Perusahaan Listrik Negara;</li> <li>e. Instansi Terkait lainnya</li> </ul>
33	Memastikan pembangunan destinasi pariwisata sebagai produk wisata yang bisa di jual oleh usaha wisata.	Feasibility study pembangunan destinasi pariwisata	Tersusunnya feasibility study pembangunan destinasi pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</li> <li>b. Perguruan Tinggi</li> </ul>
34	Memastikan kelancaran aksesibilitas ke suatu destinasi wisata dan perlengkapan infrastruktur	Sinkronisasi program dan kegiatan antara Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi dengan Dinas Pekerjaan Umum	Terkoordinirnya program dan kegiatan antara Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata dengan Dinas Pekerjaan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas kebudayaan dan pariwisata;</li> <li>b. Dinas Pekerjaan Umum</li> <li>c. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi</li> </ul>
35	Memastikan pasokan sumber daya manusia pariwisata yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata ( <i>link and match</i> )	Penyusunan skema kerjasama perguruan tinggi dengan pelaku usaha pariwisata dalam hal penyediaan sumber daya manusia	Tersusunnya skema kerjasama perguruan tinggi dengan pelaku usaha pariwisata dalam hal penyediaan sumber daya manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;</li> <li>b. Pelaku Usaha Pariwisata;</li> <li>c. Perguruan Tinggi</li> </ul>

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
1	2	3	4	5
36	Menciptakan skema kerjasama antara industri pariwisata dengan industri keuangan untuk membuat produk keuangan yang mendukung pengembangan pariwisata (misal:kredit wisata dan modal kerja untuk usaha mikro,kecil dan penengah pariwisata)	Penyusunan skema kerjasama antara industri pariwisata dengan industri keuangan	Tersusunya skema kerjasama antara industri pariwisata dengan industri keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan</li> <li>b. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ;</li> <li>c. Perbankan</li> </ul>
37	Menjamin kelancaran jalur transportasi menuju ke seluruh fasilitas dan daya tarik wisata	Penyusunan skema kerjasama antara pemerintah daerah dan pelaku usaha jasa dan transportasi	Tersusunya skema kerjasama antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha jasa transportasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemerintah daerah;</li> <li>b. Pelaku Usaha Jasa Transportasi</li> </ul>

#### E. RINCIAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
1	2	3	4	5
1	Pengembangan unit kerja yang berfungsi mengkoordinasikan dan menggerakkan sinergi lintas sektor terkait dengan implementasi instruksi Presiden Nomor 16 tahun 2005 tentang kebijakan pembangunan kebudayaan dan pariwisata	Peningkatan kinerja unit kerja yang berfungsi mengkoordinasikan dan menggerakkan sinergi lintas sektor terkait dengan implementasi instruksi presiden Nomor 16 tahun 2005 tentang kebijakan pembangunan kebudayaan dan pariwisata	Meningkatnya kinerja unit kerja yang berfungsi mengkoordinasikan dan menggerakkan sinergi lintas sektor terkait dengan implementasi instruksi presiden Nomor 16 tahun 2005 tentang kebijakan pembangunan kebudayaan dan pariwisata	Instansi yang terkait denda instruksi presiden Nomor 16 tahun 2005 tentang kebijakan pembangunan kebudayaan dan pariwisata
		Sinkronisasi program dan kegiatan pengembangan kepariwisataan yang dilakukan oleh instansi yang terkait dengan instruksi presiden Nomor 16 tahun 2005 tentang kebijakan pembangunan kebudayaan dan pariwisata	Tersingkronisasinya program dan kegiatan pengembangan kepariwisataan yang dilakukan oleh instansi yang terkait dengan instruksi presiden Nomor 16	Instansi yang terkait dengan instruksi presiden Nomor 16 tahun 2005 tentang kebijakan pembangunan kebudayaan dan pariwisata

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
1	2	3	4	5
		pariwisata	tahun 2005 tentang kebijakan pembangunan kebudayaan dan pariwisata	
2	Pengembangan unit kerja yang berfungsi menggerakan bidang investasi pariwisata	Peningkatan kinerja unit kerja yang berfungsi menggerakan bidang investasi  Penyusunan profil investasi bidang pariwisata	Meningkatnya kinerja unit kerja yang berfungsi menggerakan bidang investasi, Tersusunnya profil investasi bidang pariwisata	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata b. Badan Penanaman Modal Daerah c. Perguruan Tinggi
3	Implementasi pembentukan dan opresionalisasi gabungan industri pariwisata (GIP) dalam mengembangkan industri pariwisata	Fasilitas pembentukan dan operasi onalisasi badan promosi pariwisata (GIP)	Terfasilitasinya pembentukan dan operasionalisasi gabungan industri pariwisata (GIP)	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata b. Industri Pariwisata
4	Implementasi pembentukan dan operasionalisasi badan promosi pariwisata daerah (BPPD)	Fasilitasi pembentukan dan operasionalisasi badan promosi pariwisata daerah (BPPD)	Terfasilitasinya pembentukan dan operasional badan promosi pariwisata daerah (BPPD)	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; b. Industri Pariwisata
5	Implementasi pembentukan dan operasionalisasi <i>destination management organization</i> (DMO)	Fasilitas pembentukan dan operasionalisasi <i>destination management organization</i> (DMO)	Terfasilitasnya pembentukan dan operasionalisasi <i>destination management organization</i> (DMO)	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; b. Stakeholder Pariwisata
6	Peningkatan peran organisasi masyarakat pariwisata melalui kelompok sadar wisata (pokdarwis)	Fasilitas pembentukan kelompok sadar wisata ( <i>pokdarwis</i> )  Pelibatan kelompok sadar wisata ( <i>pokdarwis</i> ) dalam penerapan sapta pesona	Terfasilitasinya pembentukan kelompok sadar wisata ( <i>pokdarwis</i> )  Terlibatnya kelompok sadar wisata ( <i>pokdarwis</i> ) dalam penerapan sapta pesona	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata b. Masyarakat
7	Perkuatan kelembagaan industri pariwisata	Fasilitasi kelembagaan industri pariwisata	Terfasilitasinya kelembagaan industri pariwisata	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata b. Industri Pariwisata
8	Peningkatan kerjasama pemerintah dengan industri dan antar industri pariwisata	Penyusunan program pembangunan pariwisata antara pemerintah dengan industri dan antar industri pariwisata	Tersusunya program pembangunan pariwisata antara pemerintah dengan industri dan antar industri pariwisata	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
1	2	3	4	5
9	Revitalisasi asosiasi-asosiasi pelaku industri pariwisata	Revitalisasi asosiasi-asosiasi pelaku industri pariwisata, seperti asosiasi travel dan agen indonesia (ASITA), persatuan hotel dan restoran indonesia (PHRI), himpunan pramuwisata indonesia (HPI) dan asosiasi wisata agro indonesia (AWAI) provinsi Kalimantan Tengah	Terrevitalisasinya asosiasi-asosiasi pelaku industri pariwisata	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata b. Industri c. Asosiasi Kepariwisataan
10	Pengembangan destination manajement organization atau <i>destination managemen corporation</i>	Pelibatan destination management organization atau destination management corporation dalam penyusunan kebijakan pengembangan destinasi provinsi Kalimantan Tengah	Terlibatnya destination management organization atau <i>destination management corporation</i> dalam penyusunan kebijakan pengembangan destinasi provinsi Kalimantan Tengah	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata b. Industri c. Destination Management Organization atau <i>Destination Managemen Corporation</i>
		Fasilitasi kelembagaan <i>destination management organization</i> atau <i>destination managemen corporation</i>	Terpasilitasinya kelembagaan <i>destination management organization</i> atau <i>destination management corporation</i>	
11	Pembentukan lembaga / forum komunikasi di tingkat masyarakat	Pembentukan forum komunikasi masyarakat yang peduli terhadap pembangunan pariwisata	Terbentuknya forum komunikasi masyarakat yang peduli terhadap pembangunan pariwisata	a. dinas kebudayaan dan pariwisata b. Masyarakat
12	Pengembangan badan pemasaran dan promosi pariwisata daerah	Pelibatan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyusunan kebijakan promosi pariwisata	terlibatnya Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyusunan kebijakan promosi pariwisata	a. Badan Promosi Pariwisata Daerah b. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
13	Pengembangan pendidikan bagi pejabat/calon pejabat pariwisata	Sort course kepariwisataan bagi pejabat/calon pejabat tentang kepariwisataan	terbekalinya pejabat/calon pejabat tentang kepariwisataan	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata b. Perguruan Tinggi
14	Membuat perencanaan sumberdaya manusia	Penyusunan perencanaan sumberdaya manusia pariwisata di lingkungan pemerintah daerah	Tersusunnya perencanaan sumberdaya manusia pariwisata di lingkungan pemerintah daerah	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata b. Badan Kepegawaian Daerah

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
1	2	3	4	5
15	Program <i>technical assistance</i>	<i>technical assistance</i> bagi industri pariwisata (homestay, hotel, restoran, usaha mikro kecil dan menengah dan lain-lain)	Terdampingnya industri pariwisata dalam mengembangkan usahanya	a. Dinas kebudayaan dan pariwisata b. pelaku industri pariwisata
16	Program magang	Pelaksanaan magang untuk peningkatan kompetensi sumberdaya manusia industri pariwisata	Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia industri pariwisata	a. Dinas kebudayaan dan pariwisata b. Pelaku industri pariwisata
		Pelaksanaan magang untuk peningkatan kompetensi sumberdaya manusia di bidang industri pariwisata	Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang industri pariwisata	a. Dinas kebudayaan dan pariwisata dan b. Pelaku Industri Pariwisata
17	Program pendidikan pengembangan pariwisata	Pembinaan dan pelatihan pengembangan pariwisata bagi masyarakat pegiat pariwisata	Terbina dan terlatihnya masyarakat pegiat pariwisata	a. Dinas kebudayaan dan Pariwisata b. Perguruan tinggi
18	Pemberian kesempatan pendidikan formal lanjutan untuk karyawan patensial	Bea Siswa Pendidikan Formal Lanjutan Untuk Sumberdaya Manusia Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah.	Terwujudnya beasiswa Pendidikan Formal lanjutan untuk sumber daya manusia Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah	a. Dinas kebudayaan dan Pariwisata b. Badan Kepegawaian daerah c. Perguruan tinggi
19	Pelatihan <i>customer services</i>	Pelatihan <i>tourism hospitality</i> bagi <i>frontline people</i> industri pariwisata	Terlatihnya <i>tourism</i> dan <i>costumer services</i> bagi pengelola daya tarik wisata (DTW)	a. Dinas kebudayaan dan Pariwisata b. Industri Pariwisata
		Pelatihan <i>tourism</i> dan <i>costumer services</i> bagi pengelola daya tarik wisata (DTW)	Terlatihnya <i>frontline people</i> industri pariwisata	a. Dinas Kebudayaan dan pariwisata b. Pengelolaan daya tarik wisata (DPW)
20	Penetapan standar kualitas karyawan	Penyusunan pedoman standar kualitas karyawan di industri pariwisata	Tersusunya pedoman standar kualitas karyawan di industri pariwisata	a. Dinas kebudayaan dan pariwisata b. Industri Pariwisata
21	Kerjasama dengan badan nasional sertifikasi profesional (BNSP) dalam pembuatan standar Kompetensi Kerja Nasional	Penyusunan standar kompetensi kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang pariwisata	Tersusunya pedoman standar kompetensi kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang pariwisata	a. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) b. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
1	2	3	4	5
22	Sosialisasi standar kualifikasi karyawan	Sosialisasi standar kualifikasi karyawan	Tersosialisasinya standar kualifikasi karyawan di industri pariwisata	Dinas kebudayaan dan pariwisata
23	Penerapan standar kualifikasi karyawan	Fasilitasi implemetasi standar kualifikasi karyawan di industri pariwisata	Terfasilitasinya standar kualifikasi karyawan di industri pariwisata	a. Dinas kebudayaan dan pariwisata b. Industri pariwisata
		Monitoring dan evaluasi standar kualifikasi karyawan di industri pariwisata	Termonitor dan terevaluasinya implementasi standar kualifikasi karyawan di industry pariwisata	a. Dinas kebudayaan dan pariwisata b. Industri pariwisata
24	Pendataan kondisi sumberdaya manusia berdasarkan tingkat pendidikan, sertifikasi kompetensi	Sensus sumber daya manusia Pariwisata berdasarkan tingkat pendidikan sertifikasi kompetensi	Terdatanya sumberdaya manusia Pariwisata berdasarkan tingkat pendidikan sertifikasi kompetensi	a. Badan Pusat statistik b. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
25	Pendataan jumlah kebutuhan sumberdaya manusia di industri dan pemerintah	Pendataan jumlah kebutuhan sumberdaya manusia di industri dan pemerintah	Terdatanya jumlah kebutuhan sumberdaya manusia di industri dan pemerintah	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata b. Badan kepegawaian daerah c. Industri Pariwisata
26	Bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam meningkatkan kemampuan pelaku industri di luar jalur akademik	Penyusunan skema kerjasama dengan perguruan tinggi dalam meningkatkan kemampuan pelaku industri di luar jalur akademik	Tersusunnya skema kerjasama dengan perguruan tinggi dalam meningkatkan kemampuan pelaku industri di luar jalur akademik	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata b. Badan kepegawaian daerah c. Industri Pariwisata
27	Pendidikan dan pelatihan <i>techno entrepreanur</i>	Pendidikan dan pelatihan <i>techno entrepreanur</i>	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan <i>entrepreanur</i>	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata b. Perguruan Tinggi
28	Pelatihan kewirausahaan pada sektor unit usaha mikro, kecil dan menengah	Pelatihan kewirausahaan pada sektor unit usaha pada mikro, kecil dan menengah	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan kewirausahaan pada sektor unit usaha pada mikro, kecil dan menengah	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata b. Perguruan Tinggi
29	Penerapan sertifikasi profesi	Penerapan sertifikasi profesi	Diterapkannya sertifikasi profesi	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata b. Badan Nasional sertifikasi profesi

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
1	2	3	4	5
30	Sosialisasi sertifikasi profesi pelaku industri pariwisata	Sosialisasi sertifikasi profesi pelaku industri pariwisata	tersosialisasinya sertifikasi profesi pelaku industri pariwisata	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata b. Badan Nasional sertifikasi profesi c. Pelaku Wisata
31	Pemberlakuan standarisasi penilaian kompetensi para pelaku wisata	Pelatihan standarisasi penilaian kompetensi para pelaku wisata/sumber daya manusia penilaian kompetensi para pelaku wisata / sumber daya manusia	Terlatihnya pelaku wisata yang memiliki kompetensi di bidang usahanya teridentifikasinya kompetensi pelaku wisata	a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata b. Badan Nasional sertifikasi profesi c. Pelaku Wisata

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

Salinan sesuai dengan aslinya

**ttd**

**AGUSTIN TERAS NARANG**

**KEPALA BIRO HUKUM**  
**SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



AMIR HAMZAH K. HADI